



Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Kerangka UU Sistem Keolahragaan Nasional sebagai Strategi Penguatan Pembangunan Olahraga

Muhammad Gilang Ramadhan^{1*}, Amung Ma'mun², Agus Mahendra³, Hikmat Kodrat⁴, Tian Kurniawan⁵

1,2,3 Department of Sport Education, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
4,5 Department of Sport Science, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Article Info

Article History

Didaftarkan: Februari 1, 2021
Diterima: Maret 10, 2021
Dipublikasikan: April 30, 2021

Article Access



Correspondence

Muhammad Gilang Ramadhan
E-mail:
gilangramadhan320@gmail.com

Abstract

Physical education has a strategic role in shaping a sports culture in the school environment. The National Sports System Law has mandated the importance of developing educational sports, but its implementation in the field still faces various challenges. This study aims to analyze how physical education policies are implemented in building a sports culture in schools. The approach used is qualitative descriptive, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that although physical education policies have referred to national regulations, their implementation has not been evenly distributed and has not fully encouraged a comprehensive sports culture. This study provides new insights regarding the effectiveness of educational sports policies at the local level as well as strategic recommendations for further development.

Keywords: Education sports, sports development, national sports system, constitutions

Abstrak

Pendidikan jasmani memiliki peran strategis dalam membentuk budaya olahraga di lingkungan sekolah. Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional telah mengamanatkan pentingnya pengembangan olahraga pendidikan, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan jasmani diterapkan dalam membangun budaya olahraga di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan jasmani telah mengacu pada regulasi nasional, pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya mendorong budaya olahraga secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan wawasan baru terkait efektivitas kebijakan olahraga pendidikan di tingkat lokal serta rekomendasi strategis untuk pengembangan lebih lanjut.

Kata kunci: Olahraga pendidikan, pembangunan olahraga, sistem keolahragaan nasional, undang-undang



Pendahuluan

Saat ini, paradigma pembangunan melalui olahraga (*Development through Sport*) semakin berkembang di negara-negara maju, menggantikan paradigma lama, yaitu pembangunan olahraga (*Development of Sport*) (Black, 2017). Pergeseran paradigma ini menjadi isu penting dalam wacana olahraga global, termasuk di kawasan Asia dan Eropa. Korea Selatan, sebagai salah satu negara maju di Asia, telah mulai menerapkan paradigma ini melalui program "Dream Together" yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan prestasi olahraga, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas (Ha et al., 2015).

Sebelum Korea Selatan, Jepang telah melakukan kajian dan reformasi kebijakan olahraga yang signifikan. Penelitian oleh Yamamoto (2012) menunjukkan bahwa Jepang menetapkan Undang-Undang Dasar mengenai Olahraga melalui momentum politik yang tepat. Tiga langkah penting yang dilakukan Jepang antara lain: meningkatkan peran pemerintah dalam olahraga, menetapkan pokok-pokok kebijakan olahraga, serta menata ulang struktur administrasi olahraga yang terfragmentasi. Langkah-langkah ini menunjukkan kesamaan arah kebijakan dengan Indonesia, yang juga telah mengadopsi paradigma pembangunan melalui olahraga melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) (Ma'mun, 2019).

Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pengembangan olahraga nasional dan menegaskan komitmen Indonesia terhadap pembangunan masyarakat yang sehat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, khususnya dalam hal pergeseran paradigma dari *pengembangan olahraga* menjadi *pengembangan melalui olahraga* (Ma'mun, 2016).

Kesehatan merupakan indikator penting dalam pembangunan nasional. Negara yang sehat dapat dikategorikan sebagai negara maju (Rowe, 2015). Oleh karena itu, implementasi kebijakan olahraga perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah (Won & Hong, 2015). Di Indonesia, pengukuran keberhasilan pembangunan olahraga dilakukan melalui *Sport Development Index* (SDI), yang mencakup empat dimensi utama: ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan tingkat kebugaran jasmani (Mutohir & Maksum, 2007). Untuk meningkatkan SDI, perlu adanya peningkatan aktivitas olahraga masyarakat yang didukung kebijakan pemerintah berbasis UU No. 3 Tahun 2005. Implementasi yang efektif sangat penting, khususnya di kota-kota seperti Bandung yang mengalami tantangan dalam indeks pengembangan olahraga.

Selain itu, isu global seperti *Sport for Development and Peace* (SDP) juga menjadi bagian penting dari diskursus pembangunan melalui olahraga. Inisiatif ini dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menekankan peran olahraga dalam menciptakan perdamaian serta mengatasi isu-isu sosial seperti diskriminasi dan rasisme (Mwaanga & Adeosun, 2019; Mwaanga & Prince, 2016).

Efektivitas pembangunan melalui olahraga dapat dicapai jika dimulai sejak usia dini (Danish et al., 2004). Pendidikan jasmani di tingkat sekolah dasar menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang aktif, sehat, dan berdaya (Camiré & Trudel, 2010). Dalam konteks ini, Inggris telah menerapkan strategi seperti PESSCL (*Physical Education, School Sport and Club Link*) dan PESSYP (*Physical Education and Sport Strategy for Young People*) untuk mencapai tujuan sosial melalui olahraga (Department for Education, 2013). Jung et al. (2016) mengidentifikasi lima wacana utama yang membentuk kebijakan ini, yaitu: olahraga sebagai tujuan, kesehatan, kewarganegaraan, partisipasi seumur hidup, dan warisan olimpiade.

Coakley dan Pike (2009) merumuskan empat elemen kunci pendidikan jasmani di sekolah, yakni: (1) aktivitas sepanjang hayat (*lifelong activity*) melalui kurikulum pendidikan jasmani; (2) partisipasi sepanjang hayat (*lifelong participation*) melalui kegiatan di luar jam pelajaran; (3) pengembangan olahraga melalui kemitraan dengan klub luar sekolah; dan (4) pengembangan bakat melalui jalur pembinaan prestasi. Kerangka ini dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2008) dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam implementasi serta optimalisasi kebijakan pendidikan jasmani dalam membentuk budaya olahraga sekolah di Kota Bandung. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan olahraga pendidikan (Pasal 17, 18, dan 25).

Partisipan

Pemilihan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih individu yang dianggap memiliki

keterkaitan dan relevansi dengan tujuan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, khususnya yang bertanggung jawab dalam bidang olahraga pendidikan.
2. Guru pendidikan jasmani di berbagai jenjang pendidikan, yaitu:
 - a. Satu guru dari SDN Banjarsari (jenjang SD)
 - b. Satu guru dari SMPN 5 Bandung (jenjang SMP)
 - c. Satu guru dari SMAN 3 Bandung (jenjang SMA)

Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan interpretasi data. Untuk menunjang proses pengumpulan data, digunakan beberapa pedoman yang disusun berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, di antaranya:

1. Panduan observasi, untuk mengamati implementasi kebijakan olahraga pendidikan di Dispora dan sekolah.
2. Panduan wawancara, yang berisi pertanyaan terbuka mengenai proses penentuan kebijakan olahraga serta peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan tersebut.
3. Studi dokumentasi, yang mencakup analisis dokumen kebijakan, seperti:
 - a. Peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait olahraga.
 - b. Laporan kegiatan olahraga yang telah dilakukan.
 - c. Dokumen profil wilayah program keolahragaan.
 - d. Rancangan dan realisasi program kerja keolahragaan.

Prosedur

Tahapan dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Observasi langsung di kantor Dispora dan sekolah-sekolah untuk memahami kondisi implementasi kebijakan olahraga pendidikan.
2. Wawancara mendalam dengan pejabat Dispora dan guru pendidikan jasmani untuk mendapatkan informasi mengenai peran mereka dalam implementasi kebijakan.
3. Analisis dokumen, dengan menelaah kebijakan tertulis, laporan kegiatan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan implementasi olahraga pendidikan.

Analisis Data

Analisis terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dalam

konteks olahraga pendidikan menggunakan Model Kesesuaian Implementasi Kebijakan dari David C. Korten (2016). Model ini menekankan pentingnya kesesuaian antara tiga komponen utama dalam pelaksanaan suatu program, yaitu:

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat → apakah kebijakan olahraga pendidikan sesuai dengan kebutuhan guru, siswa, dan masyarakat.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana → apakah Dispora memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
3. Kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan pemanfaat → apakah kelompok sasaran dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh manfaat dari kebijakan yang diterapkan.

HASIL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya pada Pasal 17, 18, dan 25 yang membahas tentang pendidikan olahraga serta pengembangan dan pembinaannya, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan jasmani di Kota Bandung telah diimplementasikan dan sejauh mana mampu mendorong terbentuknya budaya olahraga di lingkungan sekolah. Implementasi kebijakan tersebut tercermin melalui jalur pendidikan formal dan nonformal yang masing-masing memiliki struktur, tanggung jawab, serta bentuk pelaksanaan yang berbeda. Pendidikan jasmani dalam jalur formal dilaksanakan melalui mata pelajaran wajib di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta dijalankan oleh sekolah-sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Sementara jalur nonformal berada di bawah koordinasi PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal) yang juga mendukung pelaksanaan kegiatan olahraga berbasis komunitas.

Pendidikan jasmani di sekolah mencakup aktivitas intrakurikuler sebagai bagian dari kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler yang beragam sesuai kebijakan sekolah masing-masing, seperti futsal, bulu tangkis, bola voli, dan sebagainya. Sejak dini, siswa diarahkan untuk terbiasa bergerak aktif agar terbentuk kebiasaan hidup sehat dan bugar. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh tenaga pendidik dan kepelatihan yang umumnya telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi sesuai standar nasional, baik sebagai guru, dosen, maupun pelatih olahraga. Pemerintah daerah secara rutin memfasilitasi pelatihan untuk pelatih yang belum tersertifikasi.

Meskipun sarana dan prasarana olahraga di Kota Bandung belum sepenuhnya memenuhi standar nasional, terdapat fasilitas representatif seperti Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan kawasan Sport Jabar Arcamanik yang dapat mendukung kegiatan olahraga siswa. Kegiatan kompetitif seperti POPDA, POPNAS, dan O2SN diselenggarakan secara rutin oleh instansi terkait dan telah menjadi ajang pembudayaan olahraga di sekolah. Namun, tantangan tetap ada, seperti perbedaan nomenklatur antara UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Sistem Keolahragaan Nasional terkait istilah “pendidikan jasmani dan olahraga” serta “pendidikan olahraga”.

Selain itu, belum meratanya ketersediaan kelas khusus olahraga dan sekolah khusus olahraga menjadi kendala dalam optimalisasi kebijakan. Walaupun demikian, Kota Bandung telah memiliki PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah) untuk mendukung pembinaan atlet pelajar secara terstruktur. Dengan segala dinamika yang ada, optimalisasi kebijakan pendidikan jasmani di Kota Bandung memerlukan sinergi lintas sektor agar budaya olahraga sekolah dapat tumbuh secara sistematis, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

DISKUSI

Pengembangan olahraga pendidikan yang berlandaskan pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional memiliki sejumlah indikator yang tercantum dalam Pasal 17, 18, dan 25. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, implementasi dari indikator-indikator tersebut pada dasarnya telah terlaksana. Namun, masih terdapat permasalahan dalam hal pemerataan. Salah satu penyebabnya adalah arah kebijakan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai pemangku kebijakan yang belum sepenuhnya menyentuh seluruh aspek dalam lingkup olahraga pendidikan. Temuan ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden yang mewakili guru dari jenjang SD, SMP, dan SMA, serta pihak Dinas Pendidikan yang berkolaborasi dengan Dispora dalam pembangunan olahraga pendidikan.

Hasil analisis implementasi indikator tersebut, jika diintegrasikan dengan konsep yang dikemukakan oleh Coakley dan Pike (2015), menghasilkan sebuah pola yang dikembangkan oleh peneliti. Dalam pola tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Coakley (2010), pengembangan olahraga pendidikan di Kota Bandung terdiri dari empat instrumen kunci, dengan siswa sebagai pusatnya. Ini menegaskan bahwa siswa merupakan elemen utama dalam pembangunan olahraga pendidikan.

Instrumen pertama adalah *pendidikan jasmani*, yang berperan penting dalam membentuk kebiasaan aktivitas fisik sepanjang hayat (*lifelong activity*). Pendidikan jasmani dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler di jalur pendidikan formal dan nonformal, dibimbing langsung oleh guru olahraga, serta terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional yang berjenjang dan terstruktur sejak usia dini. Kedua, *ekstrakurikuler* sebagai wahana partisipasi olahraga sepanjang hayat (*lifelong participation*) di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui unit kegiatan olahraga yang dibimbing oleh pelatih sesuai cabang olahraganya, dan diperkuat dengan kompetisi antar sekolah setiap tahunnya.

Instrumen ketiga adalah *klub olahraga*, yang mendukung pengembangan olahraga melalui pembinaan siswa berbakat sesuai cabang olahraga tertentu. Klub ini dapat berkolaborasi dengan sekolah dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan. Terakhir, *PPLP dan kelas olahraga* menjadi instrumen dalam pengembangan bakat siswa (*talent development*), dengan dukungan kompetisi berjenjang seperti O2SN, POPDA, dan POPNAS sebagai jalur seleksi dan pembinaan.

Sejalan dengan konsep Coakley dan Pike, Quennerstedt (2019) menegaskan bahwa satu-satunya tujuan berkelanjutan yang nyata bagi pendidikan jasmani adalah pendidikan jasmani itu sendiri. Artinya, keempat elemen yang telah dibahas mencerminkan arah kebijakan pendidikan jasmani yang terstruktur. Namun, yang menjadi perbedaan adalah pendekatan dalam mencapai tujuan tersebut. Sum et al. (2016) mengembangkan konsep pengajaran yang berfokus pada *seni mengajar* sebagai inti dari praktik pendidikan jasmani yang transformatif dan pluralistik. Ini menekankan pentingnya merancang pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik anak, serta keputusan pedagogis mengenai alasan, tujuan, dan cara pendidikan dilaksanakan. Seperti ditegaskan oleh Lugya (2018), pendekatan ini menekankan perlunya merebut kembali pandangan tentang anak dalam pendidikan, menegaskan kembali esensi pendidikan jasmani, serta menghidupkan kembali seni mengajar sebagai tindakan edukatif yang reflektif dan normatif.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan jasmani yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, pada dasarnya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan mencerminkan upaya untuk mendorong budaya olahraga di lingkungan sekolah. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Beberapa temuan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan amanat undang-undang, terutama dalam hal integrasi kebijakan dengan sistem pendidikan nasional, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, serta kurangnya ketersediaan wadah pengembangan prestasi seperti kelas olahraga, PPLP yang belum menjangkau jenjang pendidikan dasar, dan ketiadaan sekolah khusus olahraga.

Untuk mewujudkan budaya olahraga sekolah yang kuat dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pendidikan. Optimalisasi kebijakan pendidikan jasmani tidak hanya menuntut pemenuhan aspek regulatif dan fasilitas, tetapi juga perlu dirancang secara strategis agar mampu mencetak generasi muda yang sehat, aktif, dan berprestasi. Dengan demikian, olahraga pendidikan dapat berfungsi sebagai pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional sesuai dengan semangat dan tujuan dari UU Sistem Keolahragaan Nasional.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan penelitian ini, terkhusus kepada Universitas Pendidikan Indonesia, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan serta beberapa sekolah di Kota Bandung.

REFERENSI

- Black, D. R. (2017). The challenges of articulating 'top down' and 'bottom up' development through sport. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2(1), 7-22. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1314771>
- Coakley, J. (2010). The "logic" of specialization: Using children for adult purposes. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.2010.10598520>
- Coakley, J., & Pike, E. (2015). Gender and sports: Is equity possible? In *Sports in Society: Issues and Controversies*.
- Danish, S., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through sport. *World Leisure Journal*, 46(3), 38-49. <https://doi.org/10.1080/04419057.2004.9674365>
- Department for Education. (2013). *Physical education programmes of study: Key stages 3 and 4 - National curriculum in England*. London: DfE.

- Ha, J. P., Lee, K., & Ok, G. (2015). From development of sport to development through sport: A paradigm shift for sport development in South Korea. *International Journal of the History of Sport*, 32(10), 1262-1278. <https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1062756>
- Hasselgård, A., & Straume, S. (2015). Sport for development and peace policy discourse and local practice: Norwegian sport for development and peace to Zimbabwe. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 7(1), 87-103. <https://doi.org/10.1080/19406940.2014.890635>
- KEMENPORA. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2017*.
- Ma'mun, A. (2016). *Pembudayaan olahraga dalam perspektif pembangunan nasional: Konsep, strategi, dan implementasi kebijakan*. Sosio Humanika.
- Ma'mun, A. (2019). Governmental roles in Indonesian sport policy: From past to present. *International Journal of the History of Sport*. <https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1618837>
- Mutohir, T. C., & Maksum, A. (2007). *Sport Development Index*. Jakarta: Kemenpora.
- Mwaanga, O., & Adeosun, K. (2019). Reconceptualizing sport for development and peace (SDP): An ideological critique of Nelson 'Madiba' Mandela's engagement with sport. *Sport in Society*. <https://doi.org/10.1080/17430437.2019.1584184>
- Mwaanga, O., & Prince, S. (2016). Negotiating a liberative pedagogy in sport development and peace: Understanding consciousness raising through the Go Sisters programme in Zambia. *Sport, Education and Society*, 21(4), 588-604. <https://doi.org/10.1080/13573322.2015.1101374>
- Rowe, N. F. (2015). Sporting capital: A theoretical and empirical analysis of sport participation determinants and its application to sports development policy and practice. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 7(1), 43-61. <https://doi.org/10.1080/19406940.2014.915228>
- Yamamoto, M. Y. Y. (2012). Development of the sporting nation: Sport as a strategic area of national policy in Japan. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 4(2), 277-296. <https://doi.org/10.1080/19406940.2012.68589>